



DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

Jl. Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
Email : dinsos.probolinggokota@gmail.com
PROBOLINGGO

PERUBAHAN Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019



foto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019.

Disusunnya Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2014 – 2019 Dinas Sosial Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perencanaan taktis strategis sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah strategis ini dilakukan dengan melakukan proses transformasi dari suatu proses perencanaan strategis melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan praktis sesuai kaidah perencanaan.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2014-2019 ini.Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan serta niat yang tulus dari usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mendapatkan imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Probolinggo, Juli 2018


**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO**
Drs. H. ANULLAH, M.M.
Kepala Utama Muda
NIP. 19630811 198701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL.....	8
2.1 Tugas dan Fungsi.....	8
2.2 Sumber Daya Organisasi Dinas	24
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	29
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	33
3.3 Telaahan rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo	38
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...	40
4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Probolinggo.....	40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
4.3 Strategi dan Kebijakan	44
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	51
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	66
BAB VII. PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 yang dikarenakan adanya penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur urusan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 serta perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Probolinggo dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Probolinggo yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Probolinggo Tahun 2014-2019 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005–2025;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan rencana strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo periode 2014-2019 adalah :

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Probolinggo.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019) dapat tercapai.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran selama 5 (lima) tahun.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kualitas di bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah :

- a. Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemberian data dan informasi tentang pembangunan pertanian.
- c. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- d. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014 - 2019 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial yang terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, penjabaran visi misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2014 – 2019 beserta penjelasannya, keterkaitan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, serta strategi Kebijakan Dinas Sosial.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi rincian indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kota Problinggo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

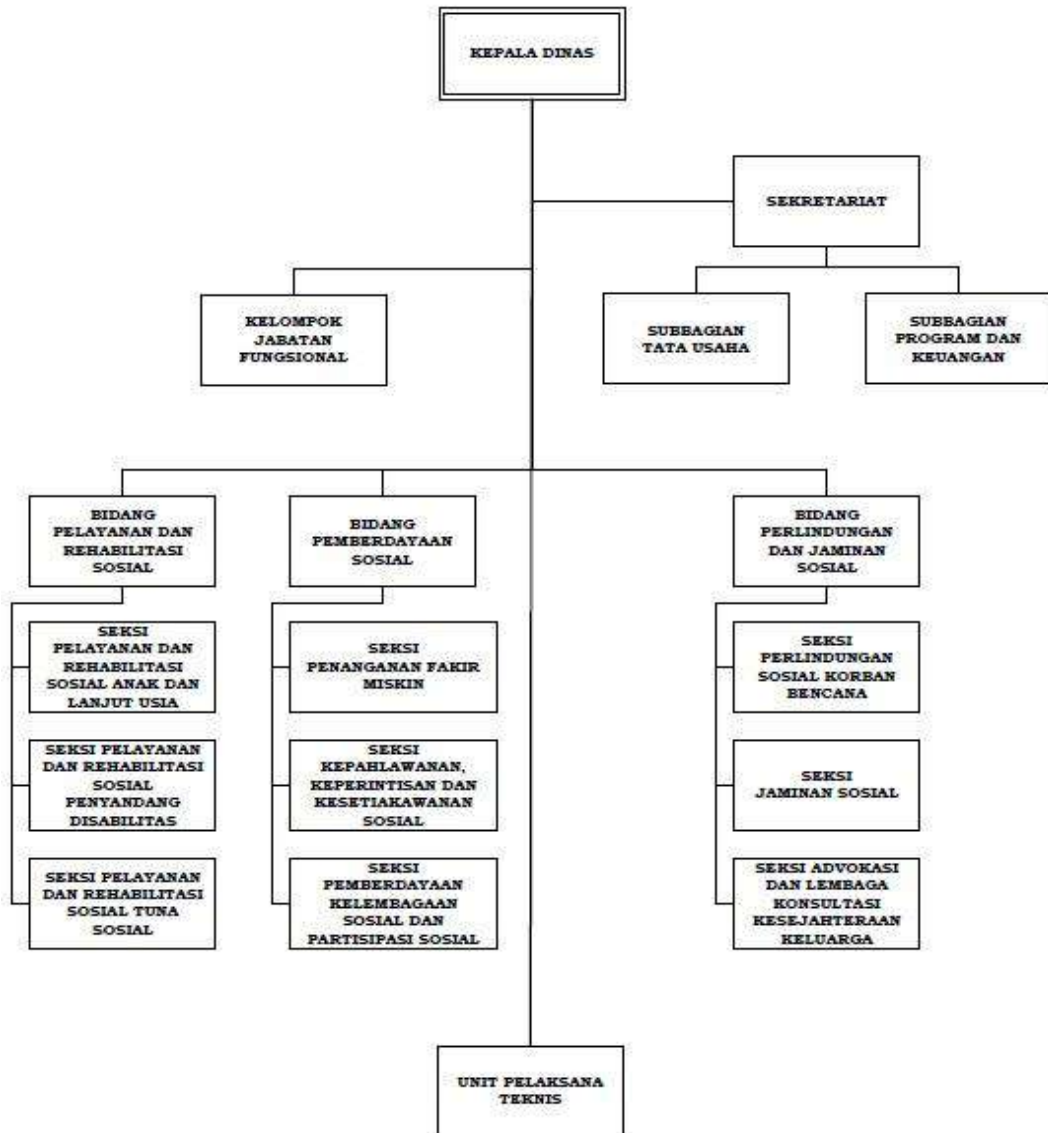
2.1 Tugas dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dikuatkan oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal 24 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang terdiri atas : 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Sosial Kota Probolinggo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan LanjutUsia;
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - Seksi Jaminan Sosial; dan
 - Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**



Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun Tanggal 24 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Tata Usaha

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;

- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan dan tata kearsipan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
- Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Menghimpun, mengolah dan menyajikan Data hasil program dan kegiatan Dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Program dan Keuangan

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

- Mendokumentasikan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi :
 - Perumusan rencana kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,

pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
- Melaksanakan pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :
 - Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis;
- Melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas :
 - Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
- Melaksanakan pelayanan sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
- Melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

- a. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
 - Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan SeksiKepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

- Menyiapkan bahan dan bimbingan teknis pada bidang pemberdayaan sosial terkait kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan;
- Melaksanakan kegiatan terkait kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Penanganan Fakir Miskin

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Melaksanakan bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan ekonomi dan keluarga rentan;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;

- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial

a. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
- Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dunia usaha, pekerja sosial masyarakat (PSM) dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
- Melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan dan pemantauan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;

- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - Perumusan rencana kerja dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.; dan
 - Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyiapkan bahan dan bimbingan teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana;
- Melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Jaminan Sosial

a. Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Jaminan Sosial;

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Jaminan Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, orang terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Melaksanakan pemberian rekomendasi pelayanan jaminan kesehatan;
- Melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, orang terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi,serta penguatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Jaminan Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial

- a.Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang advokasi bagi konselor sukarela dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;
- Memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Unit Pelaksana Teknis

a. Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

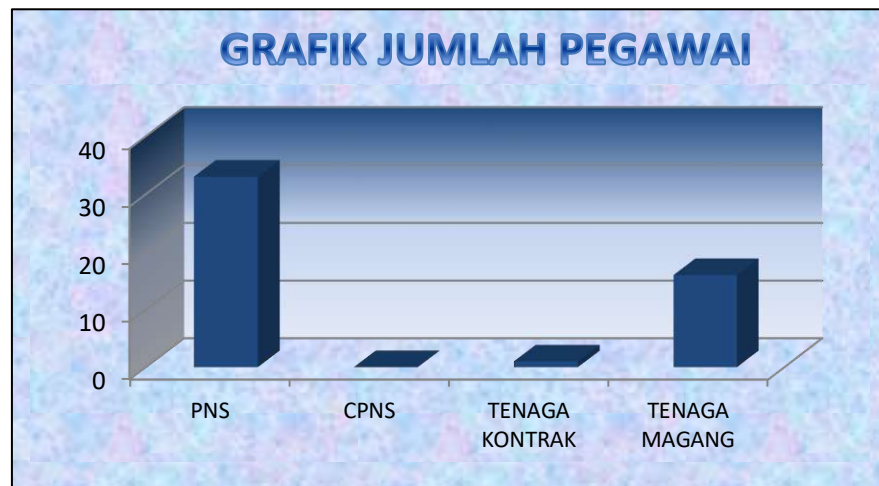
2.2 Sumber Daya Organisasi Dinas

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Probolinggo pada Tahun 2018seluruhnya sebanyak 52 orang. Dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kota Probolinggo dapat ditunjukkan pada data berikut :

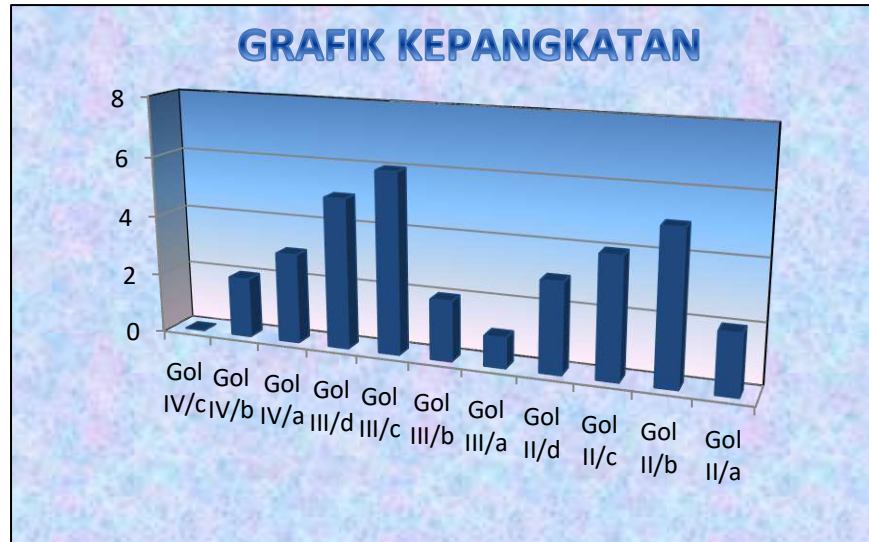
➤ Jumlah Pegawai

- a. PNS sebanyak: 34 orang
- b. CPNS sebanyak: 0 orang
- c. Tenaga Kontrak sebanyak: 1 orang
- d. Tenaga magang sebanyak : 17 orang
- Jumlah**: 52 orang



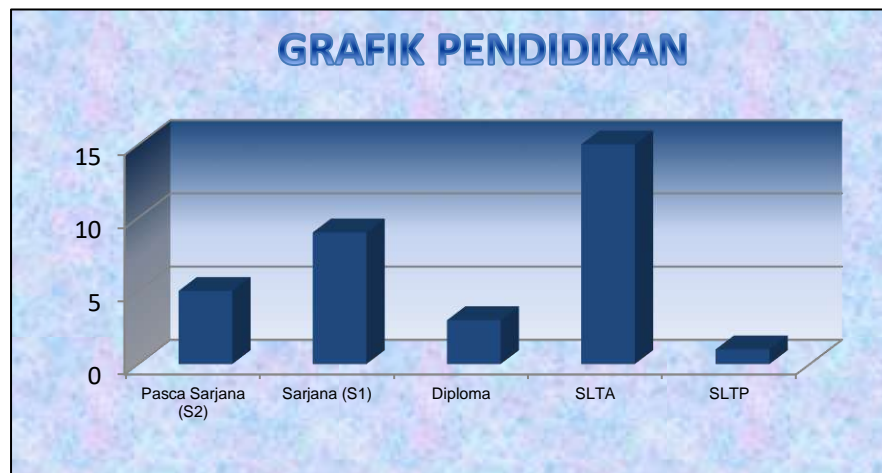
➤ Data Kepangkatan

- a. Golongan IV / c sebanyak.....: 1 Orang
- b. Golongan IV / bsebanyak : 1 Orang
- c. Golongan IV / a sebanyak : 2 Orang
- d. Golongan III / d sebanyak : 9 Orang
- e. Golongan III / c sebanyak : 2 Orang
- f. Golongan III / b sebanyak : 2 Orang
- g. Golongan III / a sebanyak : 1 Orang
- h. Golongan II / d sebanyak : 3 Orang
- i. Golongan II / c sebanyak : 7 Orang
- j. Golongan II / b sebanyak : 4 Orang
- k. Golongan II / a sebanyak : 2 Orang



➤ **Pendidikan Umum**

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak : 6 Orang
- b. Sarjana (S1) sebanyak : 8 Orang
- c. Diploma sebanyak : 2 Orang
- d. SLTA sebanyak..... : 16 Orang
- e. SLTP sebanyak : 2 Orang



2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Lokasi	2
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Unit	11

3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit	2
4	Meja Tulis	Buah	4
5	Kipas Angin	Unit	3
6	Papan Tulis	Buah	1
7	Kursi Tamu	Buah	4
8	Kursi Lipat	Buah	140
9	Lemari Kayu	Buah	13
10	Meja Kayu/Rotan	Buah	2
11	Lemari Kaca	Buah	2
12	Papan Visual	Buah	39
13	Papan Pengumuman/Informasi	Buah	5
14	Meja Kerja	Buah	33
15	Laptop/Netbook	Unit	7
16	Mesin Ketik	Buah	2
17	Kursi Kayu/Rotan	Buah	20
18	Kursi Biasa	Buah	33
19	Printer	Unit	14
20	Kursi Kerja Pejabat	Buah	5
21	Meja Kerja Pejabat	Buah	5
22	Lemari Es	Unit	2
23	AC Split	Unit	16
24	PC Unit	Unit	16
25	Kursi rapat	Buah	93
26	Microphone/Wireless Mic	Unit	3
27	Instalasi Listrik	Titik	1
28	Korden	Buah	2
30	Dispenser	Unit	5
31	Karpet	Paket	7
32	Camera Digital	Unit	6
33	Camera DSLR	Unit	2

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kota Probolinggo masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kota Probolinggo pada Tahun 2015

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	3
2	Anak Terlantar	384
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	10
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas	202
	a. Tubuh	62
	b. Netra	3
	c. Rungu Wicara	39
	d. Mental	44
	e. Cacat Ganda	54
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	24
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	Lanjut Usia Terlantar	431
9	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	1007
	a. Tubuh	352
	b. Netra	155
	c. Rungu Wicara	96
	d. Mental	241
	e. Cacat Ganda	155
	f. Penderita Penyakit Kronis	8
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
12	Pengemis	95
13	Pemulung	20
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	14
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	54
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	35
	a. Wanita	
	b. Laki-laki	
	c. Lanjut Usia	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	0

22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6616
24	Keluarga Fakir Miskin	66453
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
	JUMLAH	75337

Sumber : Pendataan Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2015

Tabel 1.2
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kota Probolinggo pada Tahun 2015

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	3
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	29
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0
4	Penyuluh Sosial	148
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	32
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5
7	Karang Taruna	29
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0
10	Dunia Usaha yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	1.910
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2
12	Keluarga Pioner	0

Tingkat keberhasilan atau capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Probolinggo didasarkan pada pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capain kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Probolinggo berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Probolinggo, sebagai berikut :

“ Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya “

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Sosial Kota Probolinggo, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- Tersedianya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang memadai;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelaksanaan operasional kegiatan;
- Tersedianya kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dikuatkan oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal 24 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo;
- Tersedianya dukungan dana dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- Terbentuknya mekanisme kerja sesuai dengan keahlian, tugas pokok, dan fungsi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Dinas Sosial Kota Probolinggo;
- Terbatasnya jumlah personel baik pada sekretariat maupun bidang pada Dinas Sosial Kota Probolinggo;

- Banyaknya usulan atau permintaan bantuan dari masyarakat yang belum tertangani secara optimal karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Sosial Kota Probolinggo, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi :

- Adanya dukungan dari DPRD Kota Probolinggo/Legislatif;
- Adanya kebijakan dan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

b. Faktor Tantangan Organisasi :

- Kurang maksimalnya Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akurat dan tepat sasaran;
- Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu;
- Belum terpenuhinya secara maksimal untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin;
- Lemahnya koordinasi antar satuan kerja.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2015 adalah anak balita terlantar (3 jiwa), anak terlantar (384 jiwa), anak yang berhadapan dengan hukum (10 jiwa), anak dengan kedisabilitasan (202 jiwa), anak yang menjadi korban tindak kekerasan (24 jiwa), lanjut usia terlantar (431 jiwa), Penyandang disabilitas (1007 jiwa), Pengemis (95 jiwa) dan lain sebagainya. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
- b. Peningkatan jumlah anak balita terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan permasalahan sosial di Kota Probolinggo masih relatif sangat besar.

➤ Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	3
2	Anak Terlantar	384
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	10
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	202
	a. Tubuh	62
	b. Netra	3
	c. Rungu Wicara	39
	d. Mental	44
	e. Cacat Ganda	54
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	24
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan	0

	Khusus	
8	Lanjut Usia Terlantar	431
9	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	1007
	a. Tubuh	352
	b. Netra	155
	c. Rungu Wicara	96
	d. Mental	241
	e. Cacat Ganda	155
	f. Penderita Penyakit Kronis	8
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
12	Pengemis	95
13	Pemulung	20
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	14
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	54
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	35
	a. Wanita	
	b. Laki-laki	
	c. Lanjut Usia	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	0
22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6616
24	Keluarga Fakir Miskin	66453
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
	JUMLAH	75337

➤ Adapun data jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	3
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	29
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0
4	Penyuluh Sosial	148
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	32
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	5

	(TKSK)	
7	Karang Taruna	29
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0
10	Dunia Usaha yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	1.910
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2
12	Keluarga Pioner	0

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo. Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 mendatang. Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut :

***“ Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan yang Maju,
Sejahtera dan Berkeadilan ”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan sosial. Dengan demikian kondisi masyarakat yang maju akan bermakna kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan penerapan nilai-nilai dan norma agama serta pengamalan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan. Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Sejahtera : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan. Masyarakat kota Probolinggo yang terwujud kesejahteraannya karena keberhasilan upaya pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus berusaha untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraannya. Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk

perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Berkeadilan : Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemerataan distribusi hasil pembangunan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga Kota Probolinggo.

Berkeadilan berarti dapat diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti juga terwujudnya kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pembangunan yang berkeadilan juga bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa sekarang saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana arah visi Kepala Daerah terpilih.

Kota Jasa Berwawasan Lingkungan : Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi Informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik kota, yang didalamnya melekat

penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan sekaligus pengendali dalam operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan Misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi. Berikut Misi Kota Probolinggo :

Misi I : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetensi.

Misi II : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo yang Kokoh dan Berkeadilan.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo 2019, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulensi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

Misi III : Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan perluasan partisipasi publik.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

Misi IV : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan.

Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi V : Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal.

Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dari 5 (lima) Misi Kota Probolinggo, Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial termasuk dalam Misi Kota Probolinggo yang kelima yaitu :

Misi Kelima : **“ Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal”**

Sebagai upaya untuk mencapai **Misi V**, maka **Tujuan** pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Rencana Strategis 2014-2019

“ Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan yang tertib, aman, dan berkeadilan dalam bingkai kearifan lokal “

dengan **Sasaran** Pembangunan:

- 1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;**
- 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;**
- 3. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Sosial Masyarakat.**

Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 terkait erat dengan operasionalisasi 10 (sepuluh) Program Kepala Daerah terpilih yaitu :

1. Program Pembangunan Prasarana Lingkungan Pemukiman.
2. Program Probolinggo Membara (Membangun Bersama Rakyat).
3. Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Program Pemantapan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan.
6. Program Padat Karya untuk Penanggulangan Kemiskinan.
7. Program Peningkatan Peran Kelembagaan (Revitalisasi) POSYANDU.
8. Program Pembangunan Kota Jasa dan Investasi.
9. Program Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan.
10. Program Pemantapan pelaksanaan 4 Pilar Kebangsaan.

Dari 10 program Kepala Daerah terpilih tersebut, yang bisa diadopsi dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 adalah **Program Pemantapan Ketepatan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan**. Program tersebut diwujudkan dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo

Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Probolinggo ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Probolinggo. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kota Probolinggo membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Probolinggo

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Probolinggo yaitu “Probolinggo Kota Jasa berwawasan Lingkungan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Visi* Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah

“Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”

Dimana makna Visi Dinas Sosial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Masyarakat Sejahtera** : Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya secara lahir dan batin;
- Masyarakat Mandiri** : Masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan berwirausaha;
- Masyarakat Berdaya Saing** : Masyarakat yang mampu bertahan dengan perubahan kondisi sosial dan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri;

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kota Probolinggo tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menjabarkannya ke dalam *Misi* sebagai berikut:

“Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”

Misi ini adalah menciptakan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing dengan upaya pemberdayaan sosial melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan bagi PMKS serta Pengembangan dan Pemberdayaan PSKS.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Probolinggo

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kota Probolinggo kelima yang mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan tersebut maka Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mewujudkan misi tersebut menetapkan **Tujuan** sebagai berikut :

***“ Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”***

Setelah menetapkan Tujuan kemudian Dinas Sosial menentukan Indikator guna mengetahui sejauh mana keberhasilan SKPD dalam rangka mencapai keberhasilan Tujuan Dinas Sosial, adapun **Indikator Tujuan** Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu :

***“ Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang berhasil hidup Mandiri ”***

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Dinas Sosial yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya ke dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan **Sasaran** sebagai berikut :

***“Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)”***

Setelah menetapkan Sasaran kemudian Dinas Sosial menentukan Indikator guna mengetahui sejauh mana keberhasilan SKPD dalam rangka mencapai keberhasilan Sasaran Dinas Sosial, adapun **Indikator Sasaran** atau disebut juga sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu :

***“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya”***

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20%	40%	60%	80%	90%

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Probolinggo

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan *“Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”* dengan sasaran *“Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”* ditetapkan **Strategi:**

“Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Kemudian menetapkan **Kebijakan :**

- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;
- Peningkatan Kualitas Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan;
- Peningkatan Kualitas Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial.

Berbagai bentuk Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun jenis Program dan Kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pembangunan Gedung Kantor;
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll).
- Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional;
- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo;
- Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- Lomba Budaya dan Disiplin Kerja;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD;
- Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI).

5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA);
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila);
- Penunjang Operasional Shelter;
- Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus;
- Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM);
- Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS;
- Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia;
- Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda);
 - Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
7. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
 - Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan;
 - Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS);
 - Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
 - Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan / Janda;
 - Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN
 - Pengadaan Bantuan Peralatan bagi Abang Becak;
 - Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;
 - Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin;
 - Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin;
 - Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat;
 - Pro Poor Award Penanggulangan Kemiskinan;
 - Bantuan Raskin;
 - Operasional Penyaluran Raskin.
9. PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL
 - Program Keluarga Harapan;
 - Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia;
 - Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA);

- Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum;
- Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH;
- Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan;
- Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana;
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- Pembinaan Juru Kunci Makam;

Tabel 4.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; ➤ Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ➤ Peningkatan Kualitas Pengembangan Keberdayaan Masyarakat; ➤ Peningkatan Kualitas Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan; ➤ Peningkatan Kualitas Pemenuhan Pelayanan dasar dan Jaminan Sosial.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS)	Persepsi Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persepsi Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	11.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Rp425.261.000	100%	Rp1.403.845.650	100%	Rp1.283.419.000	100%	Rp1.027.857.500	100%	Rp.984.182.575	100%	Rp.984.182.575	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.01.002	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan	12 bulan	12 bulan	Rp45.600.000	12 Bulan	Rp114.400.000	12 bulan	Rp126.000.000	12 Bulan	Rp150.000.000	12 Bulan	Rp122.400.000	12 Bulan	Rp122.400.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.01.018	2 Rapat-Kordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Rp107.200.000	12 Bulan	Rp715.096.600	12 bulan	Rp581.910.000	12 Bulan	Rp180.000.000	12 Bulan	Rp403.443.000	12 Bulan	Rp403.443.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.01.027	3 Penunjang Administrasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Kegiatan yang telah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Rp272.461.000	12 Bulan	Rp574.349.050	12 bulan	Rp575.509.000	12 Bulan	Rp697.857.500	12 Bulan	Rp.458.339.575	12 Bulan	Rp.458.339.575	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Presentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	Rp269.202.000	100%	Rp1.099.390.500	100%	Rp1.292.095.000	100%	Rp543.292.500	100%	Rp458.346.000	100%	Rp458.346.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.003	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor yang sudah terselesaikan	-	-	Rp-	1 Gedung	Rp180.000.000	2 Gedung	Rp230.000.000	1 Gedung	Rp177.292.500	-	Rp-	1 Gedung	Rp177.292.500	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.005	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang sudah dibeli	-	-	Rp-	-	Rp-	6 Kendaraan	Rp340.000.000	-	Rp-	-	Rp-	6 Kendaraan	Rp340.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.010	3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang sudah dibeli	12 Bulan	12 Bulan	Rp14.000.000	12 Bulan	Rp160.000.000	12 Bulan	Rp96.000.000	-	Rp-	-	Rp-	12 Bulan	Rp96.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.013	4	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Jumlah Alat Kantor/Alat Rumah Tangga/Alat studio dan Alat Komunikasi yang sudah dibeli	12 Bulan	12 Bulan	Rp102.000.000	12 Bulan	Rp461.141.500	11 Unit	Rp278.000.000	23 Unit	Rp65.500.000	-	Rp-	23 Unit	Rp65.500.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.022	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang sudah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Rp50.100.000	12 Bulan	Rp143.199.000	12 Bulan	Rp180.095.000	12 Bulan	Rp150.000.000	-	Rp-	12 Bulan	Rp150.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.023	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil jabatan yang sudah terlaksana	2 Mobil	2 Mobil	Rp26.600.000	1 Mobil	Rp25.000.000	12 Bulan	Rp29.000.000	12 Bulan	Rp25.000.000	-	Rp-	12 Bulan	Rp25.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.024	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas yang sudah terlaksana	11 Sepeda Motor	11 Sepeda Motor	Rp16.702.000	11 Motor dan 1 Mobil	Rp37.050.000	12 Bulan	Rp66.000.000	12 bulan	Rp58.500.000	-	Rp-	12 bulan	Rp58.500.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.032	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor yang sudah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Rp27.000.000	12 Bulan	Rp54.000.000	12 Bulan	Rp65.000.000	12 Bulan	Rp40.000.000	-	Rp-	12 Bulan	Rp40.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.02.036	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavings (asidll)	Terpeliharanya taman - taman Dinas Sosial	12 Bulan	12 Bulan	Rp32.800.000	10 Taman	Rp39.000.000	1 taman	Rp8.000.000	1 taman	Rp2.000.000	-	Rp-	1 taman	Rp2.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.061	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi barang yang terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	12 Bulan	Rp25.000.000	5 kegiatan	Rp20.575.000	5 kegiatan	Rp20.575.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.062	11	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan yang terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	100%	Rp249.500.000	100%	Rp249.500.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.02.063	12	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan yang telah dilaksanakan	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	12 Bulan	Rp188.271.000	12 Bulan	Rp188.271.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	Rp170.690.000	100%	Rp138.650.000	100%	Rp126.037.150	100%	Rp146.236.325	100%	Rp148.450.000	100%	Rp148.450.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.03.008	1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	40 stel	40 stel	Rp40.800.000	1 Kegiatan	Rp38.900.000	1 Kegiatan	Rp28.000.000	1 Kegiatan	Rp44.550.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp44.550.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.03.010	2	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp23.000.000	1 Kegiatan	Rp50.000.000	12 bulan	Rp1.500.000	1 Kegiatan	Rp28.568.250	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp28.568.250	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.03.012	3	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp26.000.000	1 Kegiatan	Rp31.750.000	1 Kegiatan	Rp30.000.000	1 Kegiatan	Rp31.315.075	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp31.315.075	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.03.014	4	Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp20.000.000	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp20.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.03.015	5	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	12 Bulan	12 Bulan	Rp5.000.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp66.537.150	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp66.537.150	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.05.07	6	Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp55.890.000	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp55.890.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.03.03	7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah seluruh pegawai terlayani tahunan	-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp18.000.000	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp18.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11060.0.110.601.0.3.018	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase Kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp41.803.000	100%	Rp62.035.000	100%	Rp62.035.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11060.0.110.601.0.3.020	9	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar dan hari Jadi Kota	Presentase Kegiatan Peringatan/Upacara yang terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	100%	Rp86.415.000	100%	Rp86.415.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	Rp260.799.000	100%	Rp644.825.000	100%	Rp391.440.000	100%	Rp358.822.000	100%	Rp108.636.000	100%	Rp108.636.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial	
				11.06.06.002	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp10.200.000	1 Kegiatan	Rp5.000.000	1 Kegiatan	Rp5.000.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp5.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.003	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp9.500.000	1 Dokumen	Rp12.200.000	4 Kegiatan	Rp6.000.000	4 Kegiatan	Rp6.000.000	-	Rp-	4 Kegiatan	Rp6.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.005	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp5.000.000	1 Dokumen	Rp6.900.000	1 Kegiatan	Rp3.000.000	1 Kegiatan	Rp5.000.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp5.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.008	4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBDS KPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp18.000.000	2 Dokumen	Rp15.000.000	2 Kegiatan	Rp10.000.000	2 Kegiatan	Rp10.000.000	-	Rp-	2 Kegiatan	Rp10.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.012	5	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp16.310.000	5 Dokumen	Rp3.750.000	5 Dokumen	Rp3.500.000	5 Dokumen	Rp5.000.000	-	Rp-	5 Dokumen	Rp5.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.029	6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp8.149.000	150 Responden	Rp5.925.000	1 Kegiatan	Rp5.900.000	1 Kegiatan	Rp6.000.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp6.000.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.030	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah warga penerima bantuan yang di money	-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp88.905.000	1 Kegiatan	Rp50.000.000	1 Kegiatan	Rp45.885.000	200 Orang	Rp32.920.000	200 Orang	Rp32.920.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.06.031	8	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Kegiatan Fasilitasi yang terlaksana	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Rp46.600.000	10 Kegiatan	Rp97.250.000	10 Kegiatan	Rp60.000.000	10 Kegiatan	Rp57.700.000	100%	Rp 45.265.000	100%	Rp 45.265.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.06.032	9	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp139.740.000	4 Kegiatan	Rp404.695.000	2 Kegiatan	Rp248.040.000	2 Kegiatan	Rp218.237.000	-	Rp -	2 Kegiatan	Rp218.237.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.07.11	10	Pengelolaan Informasi dan Data	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	Rp2.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	12 Bulan	Rp2.500.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11060.0.110.601.0.6.033	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program, Keuangan dan Kegiatan	Persentase dokumen laporan yang tersusun	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 30.451.000	100%	Rp 30.451.000	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				11.06.16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial	0,33%	0,33%	Rp278.514.500	0,50%	Rp1.017.635.000	0,70%	Rp1.342.217.500	0,80%	Rp1.291.864.500	0,99%	Rp1.032.936.000	0,99%	Rp1.032.936.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.012	1	Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	Rp -	-	Rp -	30 Orang	Rp40.000.000	-	Rp -	-	Rp -	30 Orang	Rp40.000.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.16.013	2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Korban HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	50 orang	50 orang	Rp10.000.000	10 Orang	Rp39.587.500	15 Orang	Rp15.000.000	15 Orang	Rp71.762.500	-	Rp -	15 Orang	Rp71.762.500	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.014	3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, EksPsikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	114 orang	114 orang	Rp97.100.000	80 Orang	Rp234.412.500	164 orang	Rp170.000.000	41 orang	Rp106.809.000	-	Rp -	41 orang	Rp106.809.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.015	4	Penunjang Operasional Shelter	Jumlah Gedung shelter yang terpelihara sebagai sarana operasional	-	-	Rp -	12 bulan	Rp234.852.000	12 bulan	Rp75.000.000	12 bulan	Rp110.885.000	100 Orang	Rp 100.000.000	100 Orang	Rp 100.000.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.016	5	Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	1 Orang	1 Orang	Rp10.000.000	10 Lansia	Rp7.875.000	1 Kegiatan	Rp22.032.500	1 Kegiatan	Rp248.152.000	-	Rp -	-	Rp -	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.017	6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	30 Orang	Rp91.100.000	53 Orang	Rp352.990.000	213 Orang	Rp374.140.000	85 Orang	Rp264.520.000	139 Orang	Rp 206.702.000	139 Orang	Rp 206.702.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.16.018	7	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	30 anak	30 anak	Rp42.900.000	50 Orang	Rp66.701.000	60 orang	Rp55.380.000	40 orang	Rp31.125.000	-	Rp -	40 orang	Rp31.125.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.019	8	Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdeteksi dan terdata	18 Orang	18 Orang	Rp10.000.000	15 Orang	Rp27.252.000	1 Kegiatan	Rp10.555.000	1 Kegiatan	Rp10.860.000	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp10.860.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.020	9	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Jumlah anggota Komite PMKS yang mengikuti penanganan PMKS	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp50.000.000	2 kegiatan	Rp69.770.000	100 Orang	Rp 57.610.000	100 Orang	Rp 57.610.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.021	10	Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan peralatan usaha dan alat bantu.	7 Orang	7 Orang	Rp17.414.500	32 Orang	Rp53.965.000	64 Orang	Rp88.110.000	37 Orang	Rp87.000.000	-	Rp -	37 Orang	Rp87.000.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.022	11	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Sosialisasi	-	-	Rp -	-	Rp -	1 kegiatan	Rp30.000.000	1 kegiatan	Rp24.295.000	100 Orang	Rp 21.861.000	100 Orang	Rp 21.861.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11.06.16.023	12	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung	Jumlah Pemulung yang mendapat pembinaan dan pelatihan Keterampilan	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp45.835.000	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp45.835.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11060.0110.601.16.026	13	Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar	Jumlah Kegiatan pembinaan/ bimbingan yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	2 Kegiatan	Rp36.857.000	-	Rp -	2 Kegiatan	Rp36.857.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11060 0.110 601.1 6.029	1 4	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan berupa Pelatihan Wirausaha	-	-	Rp -	-	Rp -	1 kegiatan	Rp100.000.000	2 Kegiatan	Rp83.324.000	30 Orang	Rp 133.324.000	30 Orang	Rp 133.324.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11060 0.110 601.1 6.030	1 5	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan berupa Pelatihan Wirausaha	-	-	Rp -	-	Rp -	1 kegiatan	Rp212.000.000	1 kegiatan	Rp100.670.000	20 Orang	Rp 150.670.000	20 Orang	Rp 150.670.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				11060 0.110 601.1 6.031	1 6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) yang terbantu	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	67 Orang	Rp 175.189.000	67 Orang	Rp 175.189.000		
				11060 0.110 601.1 6.032	1 7	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang terbantu	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	140 Orang	Rp 187.580.000	140 Orang	Rp 187.580.000		

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAA N KESEJAHTERA N SOSIAL	Persentase Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	100%	100%	Rp181.491.000	100%	Rp133.200.000	100%	Rp255.467.500	100%	Rp191.251.000	100%	Rp429.206.000	100%	Rp429.206.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
				11.06.21.009	1	Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda)	Jumlah Karang Taruna aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	35 Organisasi Sosial	35 Organisasi Sosial	Rp145.801.500	14 LKS	Rp133.200.000	35 Organisasi Sosial	Rp95.467.500	35 Organisasi Sosial	Rp95.825.000	58 Orang	Rp 112.180.000	58 Orang	Rp 112.180.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.21.010	2	Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	-	-	Rp -	-	Rp -	2 Kegiatan	Rp50.000.000	2 Kegiatan	Rp55.000.000	-	Rp -	-	Rp -	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.21.011	3	Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	100 Orang	100 Orang	Rp35.689.500	-	Rp -	8 lembaga	Rp110.000.000	13 LKS	Rp40.426.000	-	Rp -	-	Rp -	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11060.110.601.2.1.012	4	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 117.026.000	100%	Rp 117.026.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11060.110.601.2.1.013	5	Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase kegiatan yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.25		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Kegiatan Sosial yang dicapai dalam rangka mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	Rp214.485.500	100%	Rp560.675.000	100%	Rp504.960.000	100%	Rp245.266.000	-	Rp-	100%	Rp245.266.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.25.004	1	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah Veteran yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial.	70 Orang veteran	70 Orang veteran	Rp128.850.500	12 Bulan	Rp301.262.500	91 Orang	Rp100.000.000	70 orang	Rp121.366.000	-	Rp-	70 orang	Rp121.366.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.25.014	2	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp6.000.000	50 Orang	Rp113.162.500	1 Kegiatan	Rp30.000.000	12 Bulan	Rp52.150.000	-	Rp-	12 Bulan	Rp52.150.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.25.015	3	Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	5 Keranda untuk 5 keluarga	5 Keranda untuk 5 keluarga	Rp25.000.000	-	Rp-	12 Bulan	Rp75.000.000	12 bulan	Rp71.750.000	-	Rp-	12 bulan	Rp71.750.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.25.016	4	BulanBhaktiGotongRoyongMasyarakat (BBGRM)	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	2 Kegiatan	Rp250.460.000	-	Rp-	-	Rp-	2 Kegiatan	Rp250.460.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.25.017	5	Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan /Janda	Jumlah kegiatan yang terlaksana	-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp49.500.000	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp49.500.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.25.01	6	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Taman Posyandu yang mendapatkan Bantuan	20 Taman Posyandu	20 Taman Posyandu	Rp54.635.000	5 Taman Posyandu	Rp146.250.000	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	5 Taman Posyandu	Rp146.250.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.27		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil diberdayakan	27,26 %	27,26 %	Rp4.004.702.650	33,57 %	Rp1.837.607.500	38,90 %	Rp1.204.577.622	40%	Rp668.617.500	41%	Rp686.698.000	41%	Rp686.698.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.004	1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan.	-	-	Rp-	-	Rp-	2 Kegiatan/50 orang	Rp50.000.000	2 kegiatan	Rp102.187.500	-	Rp-	2 kegiatan	Rp102.187.500	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.005	2	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp112.550.000	1 Kegiatan	Rp212.347.000	1 Kegiatan	Rp75.000.000	1 Kegiatan	Rp167.500.000	700 Orang	Rp97.668.000	700 Orang	Rp97.668.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.006	3	Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan sosialisasi/ assesmen/ pembinaan	-	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan/25 Orang	Rp55.000.000	-	Rp-	-	Rp-	1 Kegiatan/25 Orang	Rp55.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.007	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/pe ralatan	43 Orang	43 Orang	Rp175.636.000	160 Orang	Rp151.059.000	54 orang	Rp100.000.000	63 Orang	Rp145.450.000	-	Rp-	63 Orang	Rp145.450.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.008	5	Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/pe ralatan	1956 orang	1956 orang	Rp2.078.571.650	420 Orang	Rp539.200.000	172 orang	Rp300.000.000	-	Rp-	-	Rp-	172 orang	Rp300.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.009	6	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan ketrampilan	40 Orang	40 Orang	Rp336.380.000	80 Orang	Rp209.071.500	3 Kegiatan/60 Orang	Rp233.170.000	30 Orang	Rp116.480.000	30 Orang	Rp116.480.000	30 Orang	Rp116.480.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

Rencana Strategis 2015-2019

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.27.011	7	Bantuan Raskin	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	17.400 Orang	17.400 Orang	Rp1.069.000.000	4257 Orang	Rp725.930.000	900 Orang	Rp198.000.000	100 Orang	Rp137.000.000	-	Rp-	100 Orang	Rp137.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.27.012	8	Operasional Penyaluran Raskin	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan raskin	-	-	Rp-	-	Rp-	12 bulan	Rp193.407.622	-	Rp-	-	Rp-	12 bulan	Rp193.407.622	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.15.16	9	Pengadaan Bantuan Peralatan bagi Abang Becak	Jumlah Kegiatan penyaluran yang terlaksana	942 Abang becak	942 Abang becak	Rp232.565.000	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	942 Abang becak	Rp232.565.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11060.0.110.601.2.7.014	10	Fasilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	143 Orang	Rp372.550.000	143 Orang	Rp372.550.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11060.0.110.601.2.7.015	11	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	60 Orang	Rp100.000.000	60 Orang	Rp100.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN (PKM) ANANDASAR DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosialnya	0,78%	0,78%	Rp811.687.000	1,46%	Rp823.962.000	2,19%	Rp695.301.450	2,57%	Rp726.767.500	3,69%	Rp806.479.000	3,69%	Rp806.479.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.016	1	Program Keluarga Harapan	Presentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Pendamping PKH yang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp171.875.000	4 Kegiatan	Rp234.372.500	4 Kegiatan	Rp92.320.000	4 Kegiatan	Rp110.000.000	100%	Rp101.314.000	100%	Rp101.314.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

						terlaksana																
				11.06.30.017	2	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Orang	100 Orang	Rp138.750.000	60 Orang	Rp162.175.000	110 orang	Rp90.000.000	116 Orang	Rp104.000.000	-	Rp-	116 Orang	Rp104.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.018	3	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA)	Jumlah Anak terlantar dan anak yatim yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 orang	50 orang	Rp27.500.000	250 Anak	Rp80.550.000	235 Anak	Rp93.582.450	145 orang	Rp67.000.000	-	Rp-	145 orang	Rp67.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.026	4	Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	Jumlah anak Bemasalah dengan Hukum yang mendapat bantuan stimulan.	10 Orang	10 Orang	Rp25.000.000	90 Orang	Rp27.915.000	1 Kegiatan	Rp20.000.000	1 Kegiatan	Rp52.892.000	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp52.892.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.029	5	Peningkatan Kompetensi Bagi Pemandamping PKH	Jumlah pendamping PKH yang mendapat pembinaan/bimbingan	23 Orang	23 Orang	Rp12.250.000	23 Orang	Rp36.575.000	1 Kegiatan	Rp45.000.000	1 Kegiatan	Rp50.500.500	-	Rp-	1 Kegiatan	Rp50.500.500	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.036	6	Pemantauan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan	35 Orang	35 Orang	Rp54.312.000	35 Orang	Rp99.619.500	2 kegiatan	Rp55.337.500	2 kegiatan	Rp53.018.500	200 Orang	Rp85.000.000	200 Orang	Rp85.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				11.06.30.03.7	7	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan pembinaan/ bimbingan yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	1 kegiatan	Rp48.861.500	1 kegiatan	Rp60.481.500	-	Rp -	1 kegiatan	Rp60.481.500	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.03.8	8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Dharma Wanita, PKK, Kasie Pemas,PS M dan masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/ Pembinaan	-	-	Rp -	-	Rp -	12 Bulan	Rp136.975.000	12 Bulan	Rp78.875.000	375 orang	Rp 50.000.000	375 orang	Rp 50.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11.06.30.03.9	9	Isbat Nikah Massal	Jumlah Warga yang mendapatkan Surat Nikah Sah	-	-	Rp -	-	Rp -	50 Orang	Rp113.225.000	50 Orang	Rp150.000.000	30 Orang	Rp 125.000.000	30 Orang	Rp 125.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.25.10	10	Pelayanan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh	Jumlah Rumah yang mendapatkan bantuan berupa Rehab rumah	100 rumah	100 rumah	Rp100.000.000	50 Rumah	Rp157.655.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	50 Rumah	Rp157.655.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.30.19	11	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan dana insentif	140 Orang	140 Orang	Rp235.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	140 Orang	Rp235.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.30.20	12	Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKES OS)	Jumlah Warga yang mendapatkan Jaminan Sosial berupa asuransi	120 Orang	120 Orang	Rp22.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	120 Orang	Rp22.500.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				1.13.1.13.1.30.30	13	Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan pembinaan	10 Orang	10 Orang	Rp20.000.000	9 Orang	Rp25.100.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	9 Orang	Rp25.100.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Probolinggo

				1.13.1 .13.1. 30.31	14	Sosialisasi Mekanisme SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)	Jumlah Sosialisasi/ Bimbingan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp4.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp4.500.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11060 0.110 601.3 0.045	15	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Persentase kegiatan yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 164.600.000	100%	Rp 164.600.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11060 0.110 601.3 0.046	16	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia	Jumlah anak yatim dan Lansia yang mendapatkan bantuan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	180 orang	Rp 117.565.000	180 orang	Rp 117.565.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				11060 0.110 601.3 0.047	17	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan BDT)	Presentase Kegiatan Verifikasi dan Validasi yang terlaksana	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 163.000.000	100%	Rp 163.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam berikut ini :

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJAPADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2014	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	34	35	38	41	44	47	47
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang)	6321	6600	6700	6800	6900	7000	7000

Tabel 6.2 TABEL KETERKAITAN IKU OPD DAN IKU KOTA PROBOLINGGO

MISI ke V	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KOTA ke 10	INDIKATOR SASARAN KOTA	OPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD
Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam Bingkai Kearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk	DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO	Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

1. Instansi : Dinas Sosial Kota Probolinggo
2. Visi : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Misi : Meningkatkan Kemandirian Sosial Masyarakat Melalui Upaya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Indikator Tujuan : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup mandiri.
5. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.
6. Fungsi :
 - Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<p>Penjelasan : Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah Jumlah PMKS yang terbantu/ditangani masing – masing Bidang pada Tahun n. Jumlah PMKS yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah jumlah hasil pendataan PMKS yang ditangani masing – masing Bidang pada Tahun n.</p> <p>Formulasi Pengitungan : $\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$</p>	Laporan Hasil Kegiatan PMKS	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo tahun 2014-2019 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kota Probolinggo. Dengan telah disepakati Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Dinas Sosial Kota Probolinggo harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari. Oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kota Probolinggo yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera dapat tercapai.

Probolinggo, Juli 2018


**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO**
[Handwritten Signature]
Drs. MANULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630811 198701 1 002